

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah pemerintahan dikatakan bagus apabila dapat memberikan informasi tentang rencana yang akan dicapai dan realisasi yang dicapai kepada pemangku kepentingan secara transparansi dan akuntabilitas. Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat seperti dalam dukungan hal Transportasi, Pendidikan dan Kesehatan. Merealisasikannya dibutuhkan dana baik dari Anggaran Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dana yang sudah dikeluarkan tersebut sudah dianggarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan daerah dalam satu periode tertentu dan kemudian anggaran yang sudah direalisasikan dituangkan dalam laporan keuangan secara transparansi untuk menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi dan akuntabilitas yang bertanggungjawab atas implementasi tujuan yang dicapai. (Iskandar, *et.al*, 2017:5552)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara transparansi dan akuntabilitas. Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu (Darise, 2008:2). Namun fenomena yang terjadi di daerah Indonesia adalah kegiatan perencanaan dan

penganggaran belum disusun dengan baik di mana koordinasi antara SKPD untuk perencanaan masih lemah, maka dari pelaksanaan yang merupakan implementasi kegiatan sering mundur dari jadwal yang direncanakan, dan kemudian di sisi administrasi masih tidak lengkap dokumen dan kesalahan administrasi masih sering terjadi. Pelaporan keuangan daerah masih sering tertunda syarat akuntabilitasnya untuk beberapa kegiatan yang tidak ditargetkan. Demikian pula dalam hal pengawasan keuangan masih lemah yang masih merupakan temuan mereka dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. (Nurmiati, et.al. 2013:2)

Isma Yatun menuturkan dalam detik.com pada tanggal 31 mei 2017 bahwa Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Secara khusus untuk LKPD DKI jakarta dalam berita (detik.com), Menurut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2016. Provinsi DKI Jakarta 4 tahun berturut turut mendapatkan opini WDP sejak tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. Menurut Harry Aziz hal ini terjadi karena adanya ketidaksiuaian standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dengan peraturan perundang-undangan, hal ini berdampak pada kualitas opini audit, terutama di Indonesia. (Nurlis,2017:112)

Dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 tentang perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Darise, 2008:2). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, agar informasi keuangan tersebut berguna bagi para penggunanya maka sebuah informasi harus dapat memenuhi laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas yaitu memenuhi sebagaimana diisyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu : Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk mendapatkan hal itu laporan keuangan yang sudah jadi akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI). BPK memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyelenggarakan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah serta memeriksa pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang disampaikan oleh pemerintah (Darise, 2008:5). Dalam hal ini BPK berhak memberikan opini kewajaran dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa dan mengungkapkan apabila ada kecurangan atau ketidaklengkapan dari data atau transaksi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

BPK memberikan 4 macam penilaian berupa opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IHPS I, 2017). opini tersebut adalah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ *Unqualified Opinion*
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ *Qualified Opinion*
3. Opini Tidak Wajar (TW)/ *Adverse*

4. Tidak atau Menolak memberi Opini (TMP)/ *Disclaimer***Tabel 1.1****Opini LKPD Tahun 2012-2016 Berdasarkan tingkat Pemerintah Daerah**

Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2012	52%	33%	15%	0%	100%	18%	63%	17%	2%	100%	33%	59%	8%	0%	100%
2013	49%	45%	6%	0%	100%	26%	61%	10%	3%	100%	38%	59%	3%	0%	100%
2014	76%	21%	3%	0%	100%	41%	50%	8%	1%	100%	60%	40%	0%	0%	100%
2015	85%	15%	0%	0%	100%	54%	38%	7%	0%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	91%	9%	0%	0%	100%	66%	29%	5%	0%	100%	78%	21%	1%	0%	100%

Sumber : IHPS 1 Tahun 2017 BPK RI

Berdasarkan tabel di atas jika di lihat dari tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun LKPD masih terus mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2013-2016 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, opini WDP tahun 2013 (45%), tahun 2014 (21%), tahun 2015 (15%), tahun 2016 (9%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang tahun 2013 (61%), tahun 2014 (50%), tahun 2015 (38%), tahun 2016 (29%), dan pada pemerintah kota dari tahun 2013 (59%), tahun 2014 (40%), tahun 2015 (33%), tahun 2016 (21%). (IHPS I, 2017)

Harry Azhar Aziz menuturkan dalam berita antaranews.com pada tanggal Senin (08 Desember 2014) bahwa Pemeriksaan oleh BPK, menilai kualitas laporan keuangan di daerah masih rata-rata rendah, dari sebanyak 456 pemerintah daerah pada tahun 2013 hanya 34 daerah yang mendapatkan laporan keuangan WTP, melihat kondisi ini masih sangat sedikit daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ketua BPK (Harry Azhar Aziz) mengatakan bahwa

“Pemerintah daerah masih lamban dalam dalam mengejar kualitas laporan keuangan dan hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai”.

Selanjutnya menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 yang di muat di detik finance.com terhadap 533 laporan keuangan pemerintah daerah hanya 312 LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 187 LKPD memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian, 30 memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan 4 LKDP memberikan opini tidak wajar. Dengan persentase WTP 58%, WDP 35%, TMP 6% dan TW 1% diakibatkan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan mengakibatkan kerugian senilai Rp2,25 triliun.

Agar menjadi sebuah laporan keuangan yang berkualitas memenuhi syarat karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu: Relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tingkat keandalan laporan keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan sistem pemerintah yang mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan terutama personil, dukungan teknologi informasi, prosedur tata kerja, perkiraan standar dan pendukung organisasi (Darise,2008:5). Melihat Fenomena di atas dalam hal menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai peraturan Standar Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mau berkomitmen bagi organisasi, sumber daya manusia yang memadai dan berkompentensi dibidangnya atau memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi

pemerintahan dengan sistem akrual dan bisa memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih untuk membantu pengaturan jadwal pelaksanaan, membantu pengawasan keuangan yang masih lemah.

Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tinggal didalam organisasi tersebut (Wibowo, 2017:213). Komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, kepedulian penuh dan ketertarikan individu terhadap organisasi yang memiliki tiga karakteristik. Pertama, memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Kedua kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi. Ketiga, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen yang dimaksud adalah memiliki perasaan terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan organisasi dengan tanggungjawab yang tinggi, tanpa merasa menjadi sebuah beban tetapi menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan karena merasa kepemilikan terhadap organisasi tersebut. Komitmen yang semakin tinggi terhadap organisasi akan memudahkan pekerjaan yang tersulit sekalipun. Hary(2013), Anwar, C. & Mukadarul D.M. (2015), Novrial Valendra Masyur(2015), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, Pengaruh globalisasi yang semakin canggih ini atau disebut semua serba instan, bahkan sampai mahasiswa pun sudah ada yang lulus secara instan yang mengakibatkan banyak mahasiswa tidak lagi memikirkan keahlian atau kompetensinya sesuai jurusan yang dimiliki.

Karyawan yang bekerja di unit kerja harus memiliki karyawan yang kompeten, yang didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengambil bagian dalam pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman di sektor keuangan sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia memiliki kompetensi, logika akuntansi dipahami dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan yang dibuat dalam laporan kesalahan dan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. (nurmiati, 2017:34). Keberhasilan pelaporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi kompetensi SDM dalam pemerintahan. Kompetensi SDM dalam mengelola keuangan pemerintah semakin baik maka laporan keuangan akan semakin berkualitas. SDM yang tidak berkompentensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efektif, efisien, dan ekonomis, maka akan terjadi pemborosan waktu dan tenaga yang mengakibatkan laporan tidak tepat waktu, semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin cepat dalam pengambilan keputusan (Mardiasno,2002 :46). SDM yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dan menjaga kelangsungan hidup organisasi (Marwansyah, 2016:34). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat (Kadek *et.al*,2014:1). Kasim E.Y (2015), Dewi Andini dan Yusrawati (2015), Nurlis da Winwin Yadiati (2017), Julita Sulastri (2018) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa

kompetensi/kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Iskandar, *et.al*, 2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yakni Pemanfaatan teknologi. Kewajiban untuk menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Perkembangan teknologi informasi akuntansi dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki dampak nyata dalam pemrosesan data dari sistem manual ke sistem komputer dan munculnya perangkat lunak untuk akuntansi yang akan mempermudah pembuatan laporan keuangan, Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak dipahami maka dapat mengganggu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan harapan (Iskandar, *et.al*, 2017:5553). Begitu juga halnya dengan adanya teknologi dengan aplikasi-aplikasi hal tersebut sangat membantu dan memudahkan para pegawai dalam melakukan transaksi, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan dan tentunya dengan adanya teknologi dapat menyimpan data dengan kapasitas yang banyak. Muhammd Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013), Novrial Valendra Masyur (2015) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan namun penelitian yang dilakukan Iskandar, *et.al*, (2017), Nurlis dan Winwin Yadiati (2017), pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena di atas bahwa pemerintahan di berbagai daerah secara khusus di pemrov DKI masih sering mendapat opini WDP terhadap kualitas laporan keuangan dan ketidakpatuhan SDM terhadap Standar akuntansi yang berlaku dikarenakan kurangnya dukungan personil, dukungan teknologi informasi, prosedur tata kerja, perkiraan standar dan pendukung organisasi, maka dengan itu saya tertarik melakukan penelitian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan judul: “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” .

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi yaitu :

- 1) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah terhadap publik yang memungkinkan terjadinya kecurigaan manipulasi informasi.
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat opini Wajar Dengan Pengecualian sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2013-2016.
- 3) Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) No.71 Tahun 2010 yaitu : Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar masalah yang dibahas di atas tidak meluas, maka diberi batasan. Penelitian ini hanya membahas faktor pendukung yang mempengaruhi rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu sebagai berikut : **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta”**.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian bagi para peneliti muda dan menambah wawasan bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Darma Persada dalam perluasan teori dan konsep dalam mengetahui kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang mempunyai karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang diteliti berdasarkan Faktor komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi sekaligus menjadi masukan bagi teman-teman sebagai partisipan untuk

mengambil mata kuliah Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Pusat dan Daerah.

2. Bagi Penulis

Secara praktis, penelitian ini akan berguna bagi penulis yaitu hasil dari penelitian ini juga berguna untuk mengetahui lebih luas tentang kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diharapkan menghasilkan informasi yang berguna bagi penulis yakni mengenai pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk menentukan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas, memberikan masukan wawasan kepada pihak SKPD dalam mempertahankan komitmen, mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam organisasi dan memanfaatkan teknologi informasi dengan benar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP.